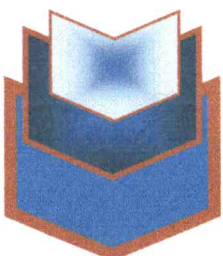




Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) TAHUN 2021

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



ESDM Kukar

KATA PENGANTAR

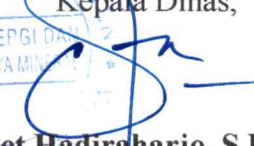


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan ***Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara***. Sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Kerja secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor. B-1219/BAPP/V.1/065.II/07/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Tahun 2021, tertanggal 2 Juli 2021.

Rancangan Perubahan RENJA-PD ini sebagai penjabaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 dan penyusunan Rencana Perubahan RENJA-PD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008 /M.PPN /01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa "musrenbang Kabupaten /Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten /Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-PD hasil Forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara Rancangan Perubahan RENJA-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Dengan segala keterbatasan waktu, Rancangan Perubahan RENJA-PD ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan, dan bimbingan untuk mengembangkan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Rancangan Perubahan RENJA-PD Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami berharap dengan Rancangan Perubahan RENJA-PD Tahun 2021 ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami buat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman kebijakan, program dan kegiatan selanjutnya.

Tenggarong, Agustus 2021
Kepala Dinas,

H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut, MM
NIP. 197004071998031013

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Kab. Kutai Kartanegara (Mapping Renstra Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050-3708)	7
1. Rekapitulasi hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2021	11
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara	14
5. Rumusan rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara	18

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja- PD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Program dan Kegiatan	15
BAB. IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasari atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RENJA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RENJA-PD mengacu pada kerangka kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD.

RKPD dan RENJA-PD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343) :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus di gunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA-PD Kutai Kartanegara 2021, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 oleh BPK.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja - PD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional

terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT)

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor : 25 Tahun 2004);

2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)
Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa ”musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD;
9. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-1219/BAPP/V.1/065.II/07/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Tahun 2021, tertanggal 2 Juli 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-PD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan RENJA-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RENJA-PD, proses penyusunan perubahan RENJUA-PD, keterkaitan antara RENJA-PD dengan dokumen RKPD RENSTRA-PD, dengan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten//Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA-PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2020, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD Tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RKPD/RENSTRA PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan.

Maka dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Perubahan Renja PD Triwulan II Tahun 2021 sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara
(Mapping Renstra Perangkat Daerah sesuai Kepmendagri 050-3708)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA-PD) s.d TAHUN 2021				REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020				TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2021)								CATATAN PENTING	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RI PD S/D TAHUN BERJALAN (2021)															
			4				5				6				7					8=(7/6x100)				9				10=(5+7)				11=(10/4x)			
			K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	%	K		Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.					
1	2	3	1) 85; 1) 100; 100; 100; 1) 100 2) 100; 3) 100	Persen	9.995.912.986				1) 85; 1) 100; 100; 100; 1) 100 2) 100; 3) 100	Persen	9.995.912.986	1) 85; 1) 100; 100; 100; 1) 100 2) 100; 3) 100	Persen	9.995.912.986	1) 85; 1) 100; 100; 100; 1) 100 2) 100; 3) 100	Persen	3.751.983.564	3.751.983.564				100	Persen	3.751.983.564	100	Persen									
		1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP; 1) Cakupan Sarana Prasarana 1) Perkantoran Dalam Kondisi Baik; 1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit																																	

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA-PD 2021

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	20	orang	149.960.000						20	orang	149.960.000	0	orang		0,00	orang	-	-	orang	Dokumen dan laporan	-	-	Dokumen dan laporan	-	-	Dokumen dan laporan	-	orang		orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				926.686.350								926.686.350																			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1	paket	149.999.800						1	paket	149.999.800	1	paket	10.050.000	100,00	paket	6,70	1	paket	10.050.000	100			paket	10.050.000			paket	100	paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan	15	jenis	31.167.550						15	jenis	31.167.550	0	jenis	-	0,00	jenis	-	-	jenis	-			jenis	-			jenis			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1	tahun	649.999.000						1	tahun	649.999.000	1	tahun	8.525.261	100,00	tahun	1,31	1	tahun	8.525.261	100			tahun	8.525.261			tahun	100	tahun
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan dokumen arsip yang tertata	1	dokumen	95.520.000						1	dokumen	95.520.000	0	dokumen	-	0,00	dokumen	-	-	dokumen	-			dokumen	-			dokumen	-	dokumen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.500.000								60.500.000																			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	800	buah	3.300.000						800	buah	3.300.000	0	buah	-	0,00	buah	-	-	buah	-			buah	-			buah	-	buah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode jasa Pembayaran Jaringan dan Rekening	12	bulan	22.500.000						12	bulan	22.500.000		bulan		0,00	bulan	-	-	bulan	-			bulan	-			bulan	-	bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan dan penggantian komponen peralatan komputer, mesin tik dan mesin foto copy	35	unit	34.700.000						35	unit	34.700.000		unit		0,00	unit	-	-	unit	-			unit	-			unit	-	unit	

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil pelaksanaan APBD Tahun 2021

URUSAN/BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/RENSTRA OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (APBD 2021)	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA		TARGET DAN REALISASI PAGU TAHUN BERJALAN (2021)			KETERANGAN
				K	% (6=5/4*100)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)	(7)	(8)	9=(8/7)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP; 1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik; 1)	1) 85; 1) 100; 1) 100; 1) 100 2) 100; 3) 100			9.995.912.986	3.751.983.564	38%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 dokumen	0 dokumen	0	300.000.000	-	0%	
	penyusunan deokumen perencanaan perangkat Daerah					100.000.000			

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA-PD 2021

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan capaian kinerja, keuangan dan perencanaan (LKjIP, RKA/DPA, Tapkin, LPPD, Caporan Kinerja (e-paritau), Renja PD, laporan Tahunan dan Laporan Keuangan)	8	okumen	3	dokumen	37,5	200.000.000	11.245.000	6%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8.162.391.136			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6	bulan	50	7.565.722.208	3.484.700.607	46%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	26	Orang	25	orang	96,15	492.628.928	215.794.795	44%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1	Laporan Kinerja	0	Laporan Kinerja	0	104.040.000	-	0%	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							48.600.000			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan BMD	0	Laporan BMD	0	48.600.000	-	0%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							212.325.500	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	15	Orang	0	Orang	0	149.960.000		0%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	62.365.500	-	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							926.686.350			

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA-PD 2021

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	Paket	100	149.999.800	10.050.000	7%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan	15	Jenis	0	Jenis	0	31.167.550	-	0%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1	Tahun	1	Tahun	100	649.999.000	8.525.261	1%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan dokumen arsip yang tertata	1	Dokumen	0	Dokumen	0	95.520.000	-	0%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							60.500.000			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	800	Buah	0	Buah	0	3.300.000	-	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode jasa Pembayaran Jaring dan Rekening	12	Bulan	0	Bulan	0	22.500.000		0%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan dan penggantian komponen peralatan komputer, mesin tik dan mesin foto copy	35	Unit	-	Unit	0	34.700.000		0%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							285.410.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	56	Unit	10	Unit	17,86	285.410.000	21.667.901	8%	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral detailnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ Standar \ Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021		2021*	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	-	-		- -	-	-	Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikator Kinerja Kunci Output Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sampai saat ini belum ada Perusahaan atau pelaku usaha pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang memiliki izin di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
			Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2014**)	-	-	-	-		- -	-	-	PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian. Petunjuk Pengisian LPPD

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan;

- b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Perubahan RENJA-PD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Pada tahun 2021 direncanakan ada 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan, serta 16 (enam belas) sub kegiatan, adapun tujuan dan sasaran program/kegiatan 2020 ditetapkan indikator kinerja program/ kegiatan , target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2021 menguraikan target kinerja yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dan target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama akhir periode Renstra PD dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis urusan ESDM, terjabar rinci dalam program kerja yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

suatu rencana. Rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan (Output))	Target Renja 2021	Lokasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP; 1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik; 1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
penyusunan deokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	1 dokumen	ESDM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan capaian kinerja, keuangan dan perencanaan (LKjIP, RKA/DPA, Tapkin, LPPD, Caporan Kinerja (e-pantau), Renja PD, laporan Tahunan dan Laporan Keuangan)	8 dokumen	ESDM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	ESDM
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	26 Orang	ESDM
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Laporan Kinerja	ESDM
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan BMD	ESDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			ESDM
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	15 Orang	ESDM
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Laporan	1 Laporan	ESDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah			ESDM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan	15 Jenis	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1 Tahun	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan dokumen arsip yang tertata	1 Dokumen	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	800 Buah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode jasa Pembayaran Jaringan dan Rekening	12 Bulan	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan dan penggantian komponen peralatan komputer, mesin tik dan mesin foto copy	35 Unit	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	56 Unit	

- c. Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif maupun kombinasi keduanya.

Penyesuaian evaluasi dari Renja dan Renstra disesuaikan dengan data RKA dan DPA, dimana di RKA, DPA, RKPD dan RPJMD ada 1 (satu) Program yaitu Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan 7 (tujuh) kegiatan, serta 16 (enam belas) sub kegiatan, adapun tujuan dan sasaran program/kegiatan 2021 ditetapkan indikator kinerja program/ kegiatan , target capaian kinerja, serta kebutuhan dana / pagu indikatif, harus sesuai dengan Program di RKPD dan Renja.

Tabel 5
Rumusan rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (APBD) Kemandagri 050-3708 Tahun 2020				Sesudah Perubahan (APBD) Kemandagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah / berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP; 1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik; 1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 85; 1) 100; 1) 100; 1) 100 2) 100; 3) 100	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.995.912.986	1) Rata-Rata Nilai Kinerja SKP; 1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik; 1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1) 85; 1) 100; 1) 100; 1) 100 2) 100; 3) 100		10.790.091.431	794.178.445		1) 85; 1) 100; 1) 100; 1) 100 2) 100; 3) 100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				300.000.000				300.000.000	-		300.000.000

	Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Laporan	1 Dokumen	DESDM	100.000.000	Laporan	1 Dokumen	DESD M	100.000.000	-	1 Dokumen	100.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan capaian kinerja, keuangan dan perencanaan (LKjIP, RKA/DPA, Tapkin, LPPD, Caporan Kinerja (e-pantau), Renja PD, laporan Tahunan dan Laporan Keuangan)	8 Dokumen	DESDM	200.000.000	Cakupan ketersediaan Dokumen pelaporan capaian kinerja, keuangan dan perencanaan (LKjIP, RKA/DPA, Tapkin, LPPD, Caporan Kinerja (e-pantau), Renja PD, laporan Tahunan dan Laporan Keuangan)	8 Dokumen	DESD M	200.000.000	-	8 Dokumen	200.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.162.391.136				8.956.569.581	794.178.445		8.956.569.581
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	DESDM	7.565.722.208	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	DESD M	8.359.900.653	794.178.445	12 Bulan	8.359.900.653
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	26 Orang	DESDM	492.628.928	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	26 Orang	DESD M	492.628.928	-	26 Orang	492.628.928
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Laporan Kinerja	DESDM	104.040.000	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1 Laporan Kinerja	DESD M	104.040.000	-	1 Laporan Kinerja	104.040.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				48.600.000				48.600.000	-		48.600.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan BMD	DESDM	48.600.000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan BMD	DESD M	48.600.000	-	1 Laporan BMD	48.600.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				212.325.500				212.325.500	-		212.325.500

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA-PD 2021

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	15 Orang	DESDM	149.960.000	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	15 Orang	DESD M	149.960.000	-	15 Orang	149.960.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Laporan	1 Laporan	DESDM	62.365.500	Dokumen Laporan	1 Laporan	DESD M	62.365.500	-	1 Laporan	62.365.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				926.686.350				926.686.350	-		926.686.350
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Paket	DESDM	149.999.800	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Paket	DESD M	149.999.800	-	1 Paket	149.999.800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan	15 Jenis	DESDM	31.167.550	Tersedianya Barang cetakan	15 Jenis	DESD M	31.167.550	-	15 Jenis	31.167.550
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1 Tahun	DESDM	649.999.000	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pemerintah Pusat	1 Tahun	DESD M	649.999.000	-	1 Tahun	649.999.000
	Penatausahaan Arsip Dnamis pada SKPD	Cakupan dokumen arsip yang tertata	1 Dokumen	DESDM	95.520.000	Cakupan dokumen arsip yang tertata	1 Dokumen	DESD M	95.520.000	-	1 Dokumen	95.520.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.500.000				60.500.000	-		60.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materi	800 Buah	DESDM	3.300.000	Penyediaan Materi	800 Buah	DESD M	3.300.000	-	800 Buah	3.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode jasa Pembayaran Jaringan dan Rekening	12 Bulan	DESDM	22.500.000	Jumlah periode jasa Pembayaran Jaringan dan Rekening	12 Bulan	DESD M	22.500.000	-	12 Bulan	22.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan dan penggantian komponen peralatan komputer,mesin tik dan mesin foto copy	35 Unit	DESDM	34.700.000	Perbaikan dan penggantian komponen peralatan komputer,mesin tik dan mesin foto copy	35 Unit	DESD M	34.700.000	-	35 Unit	34.700.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				285.410.000				285.410.000	-		285.410.000

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA-PD 2021

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	56 Unit	DESDM	285.410.000	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	56 Unit	DESDM	285.410.000	-	56 Unit	285.410.000
--	--	--	---------	-------	-------------	--	---------	-------	-------------	---	---------	-------------

BAB IV

PENUTUP

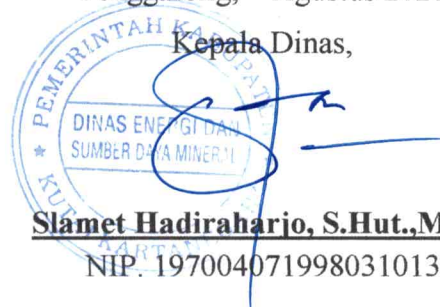
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini telah disusun. Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2021, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian seperlunya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat tercapai bila ada komitmen dan dukungan dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat dan ini dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh Sumber Daya Manusia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Agustus 2021

Kepala Dinas,



Slamet Hadiraharjo, S.Hut.,M.M.

NIP. 197004071998031013